



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOHAMMAD RIZKI ADHARI JUSAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 222605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	731.500.000
1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000		
2. MOTOR, YAMAHA XMAX BG6 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA A250RAGBXVJ10TGCVT RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
5. LAINNYA, BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.317.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	85.186.376
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.409.323.095

**F. HARTA LAINNYA****Sub Total**

Rp. ----

Rp. 12.643.009.471

III. HUTANG

Rp. 13.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.630.009.471

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.